

ISLAM DAN DEMOKRASI

Naili Rohmah Iftitah¹

Abstrak: Demokrasi merupakan istilah yang selalu hangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan baik kalangan politisi, akademisi maupun rakyat kalangan atas sampai kalangan bawah. Istilah ini sering kali dikaitkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan bernegara bahkan beragama. Dalam kaitannya dengan agama, khususnya agama islam, demokrasi marak diperbincangkan. Sehingga tulisan ini mencoba menjelaskan tentang Islam dan demokrasi, mulai dari pengertian demokrasi, hubungan agama dan demokrasi, islam dan demokrasi, serta Islam, demokrasi dan pendidikan kaitannya dengan demokratisasi pendidikan islam.

Kata kunci: Islam, demokrasi, pendidikan

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat populer. Tidak ada istilah lain dalam wacana politik yang banyak dibicarakan orang, aktivis, politisi ataupun akademisi, melebihi istilah demokrasi. Istilah ini juga didambakan semua orang terutama yang mempunyai kesadaran politik, untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa demokrasi akan lebih banyak membawa kemaslahatan manusia ketimbang implikasi negatifnya, yakni mahal dan kompleksnya dalam proses pembuatan kebijakan publik.²

¹ Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan.

² Afan Gaffar, Politik Indonesia: *Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), vii. Sisi negatif dari demokrasi di negara kita misalnya pada pemilihan umum, pilkada, pilkades, pileg, selain biaya yang dikeluarkan oleh negara sangat mahal (padahal itu adalah uang rakyat), juga sering menimbulkan penyakit sosial dengan merebaknya money politik (pembelian hak suara, padahal hak tersebut merupakan hak asasi yang tidak bisa dibeli), ditambah lagi dengan adanya konflik antar masyarakat disebabkan beda pilihan sehingga timbullah konflik dan disintegrasi dalam masyarakat

Wacana tentang demokrasi seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan ini, misalnya islam dan demokrasi, demokratisasi pendidikan islam dan sebagainya.

Pengertian Demokrasi

Secara normatif, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³ Sedangkan pengertian dari sistem politik demokrasi dinyatakan oleh Hendry B. Mayo “*a democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*”⁴ (sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip

(lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat). Selain itu problem-problem yang ditimbulkan dalam menjalankan demokrasi seperti di Britania (Irlandia Utara), Prancis (Corsica), atau Spanyol (Propinsi Basc), menunjukkan bahwa masing-masing masyarakat, paling tidak sebagian, dicirikan dengan adanya struktur konflik yang antagonistik. Lihat: Rene Klaff, *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), 22.

³ Ibid., 3. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) berarti pemerintahan yang berkuasa mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari rakyat. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat dan diawasi oleh rakyat. Sedangkan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) berarti pemerintahan yang berkuasa dalam rangka mewujudkan aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan *government for the people* tidak mengenal istilah korupsi dalam pemerintahan dalam artian jika masih ditemukan tindak korupsi berarti *government for the people* tidak terwujud. Lihat: A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 165.

⁴ Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), 70. Suatu pemerintahan menganut sistem politik demokrasi pada dasarnya didasari oleh dua alasan, *pertama*, hampir semua negara di dunia ini menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Lihat: Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), 5-6.

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Hubungan Agama dan Demokrasi

Memperbincangkan hubungan agama dan demokrasi, dalam hal ini terdapat tiga pandangan atau model yaitu:⁵

1. Model paradoksal atau model negatif yang menyatakan bahwa antara agama dan demokrasi tidak dapat dipertemukan bahkan berlawanan (agama versus demokrasi). Adapun tokoh penganut pandangan ini ini adalah Karl Marx, Max Weber, Nietzsche dan Sartre. Paling tidak ada tiga argumen tentang tidak sejalannya antara agama dan demokratisasi. *Pertama*, argumen historis-sosiologis yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan kelompok. *Kedua*, argument filosofis yang menyatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Ketiga*, argumen teologis yang menegaskan bahwa agama bersifat deduktif, metafisis dan menjadikan rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, sementara demokrasi adalah persoalan empiris, konkret dan dinamis. Maka agama tidak mempunyai kompetensi menyelesaikan persoalan demokrasi.
2. Model sekuler atau model netral menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik termasuk demokrasi berjalan sendiri-sendiri. Persoalan agama menyangkut persoalan pribadi dengan Tuhannya, dalam artian ajaran agama tidak masuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula negara tidak mengurus agama.
3. Model teodemokrasi atau model positif menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian.

⁵ Lihat: A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, 194-196.

Islam dan Demokrasi

Memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini banyak membawa nilai-nilai positif. Polemik hubungan demokrasi dengan Islam berakar pada sebuah ketegangan teologis antara rasa kehausan memahami doktrin yang telah mapan oleh sejarah dinasti-dinasti muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas timbulnya fenomena sosial yang terus berkembang.⁶ Secara garis besar wacana Islam dan demokrasi terdapat tiga pemikiran yaitu:⁷

1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda

Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok islamis atau islam ideologis, yang memandang islam sebagai sistem alternatif demokrasi, sehingga demokrasi sebagaimana konsep barat tidak tepat dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Logika yang dipakai mereka adalah pemerintahan demokrasi berasal dari barat dan barat bukanlah islam sehingga barat adalah kafir. Segala sesuatu yang kafir tentunya berdosa sehingga mengikuti demokrasi bagi muslim sejati adalah berdosa. Pendek kata, menurut kelompok ini demokrasi merupakan sistem kafir karena telah meletakkan kedaulatan negara di tangan rakyat bukan Tuhan. Kelompok ini diwakili oleh Taqiyuddin an-Nabhani dengan partainya Hizbut Tahrir yang sangat menentang ide-ide demokrasi dan berpendapat bahwa sebagian besar dari aktifitas demokrasi tertolak secara syar'i. Mereka memandang bahwa prinsip pemilu secara jelas melanggar asas *wakalah*, yaitu materi yang diwakilkan didasarkan atas asas demokrasi, yang menurut pandangan Hizbut Tahrir adalah batil.

2. Islam berbeda dengan demokrasi

Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam islam tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara islam dan de-

⁶ Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

⁷ Ibid., 52-56

mokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat. Sebaliknya jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat islam merupakan sistem politik yang demokratis. Demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Di antara tokoh muslim yang mendukung pandangan ini adalah Abul A'la al-Maududi yang menyatakan bahwa demokrasi sekuler barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam islam juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa jika di dalam sistem barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak. Dalam demokrasi islam kekhilafahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang digariskan hukum ilahi.

3. Islam membenarkan dan mendukung demokrasi

Kelompok ini sering disebut dengan kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan di negara-negara maju. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran islam seperti keadilan, persamaan, musyawaran dan lain sebagainya.

Jika demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip *kebebasan*, *kesetaraan*, dan *kedaulatan* manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan islam. Hal ini paling tidak akan tampak dalam dua hal.

Pertama, pada ajaran islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan, yaitu:⁸

- a. *Al-musawah* atau persamaan derajat kemanusiaan di hadapan Allah swt. Dalam konsepsi islam, semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya, tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaanya. Allah berfirman dalam Surat al-Hujurat (49) ayat 13:

⁸ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 41.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁹

- b. *Al-hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini didasari oleh konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Dalam islam, prinsip ini adalah ayat perjanjian ketika manusia membenarkan ke-*rububiyah*-an Allah. Allah berfirman dalam Surat al-A’raf (7) ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".¹⁰

⁹ Departemen Urusan Agama Islam, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1971), 847.

¹⁰ *Ibid.*, 250.

Islam dan Demokrasi

- c. *Al-ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia sebagai satu species yang diciptakan dari bahan baku yang sama. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ

Artinya: "manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus".¹¹

- d. *Al-'Adalah*, keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Allah berfirman dalam Surat al-Ma'idah (5) ayat 8:

¹¹ Ibid., 51.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِقَاقُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹²

- e. Al-syura, musyawarah, dimana setiap warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini mengutamakan prinsip musyawarah sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Syura (42) ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.¹³

Menurut Muhammad Alim, negara demokrasi: Syura (musyawarah sebagai demokrasi Islam), ditandai dengan¹⁴ kebebasan

¹² Ibid., 159.

¹³ Ibid., 789.

¹⁴ Lihat: Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 159-229. Wacana Islam dan demokrasi (Syura, demokrasi islam) tidak hanya mengadopsi dan menyatakan sebagai sesuatu yang islami atau cocok dengan islam, elemen-elemen tertentu dari organisasi politik demokrasi modern seperti pemilihan umum, perwakilan, pemerintahan parlementer atau pemisahan kekuasaan. Namun wacana tersebut juga memasukkan

Islam dan Demokrasi

berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dari ketakutan, kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan memilih tempat tinggal, persamaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak atas suaka politik, hak dan kewajiban membela negara, dan hak atas perlindungan kebebasan pribadi.

- f. *Al-Mas'uliyah/responsibility*, prinsip pertanggungjawaban yang dipikul oleh setiap pemegang kekuasaan. Perlu dipahami bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus diwaspadai dan bukan nikmat yang harus disyukuri. Khusus bagi penguasa, pengertian amanah berarti fungsi ganda yakni amanat Allah dan amanat rakyat.¹⁵

Kedua, ajaran islam tentang hak-hak yang harus diusahakan pemenuhannya oleh diri sendiri maupun masyarakat/negara yang meliputi:

- a. *Hifdz al-nafsi*, hak hidup¹⁶
- b. *Hifdz al-din*, hak beragama¹⁷
- c. *Hifdz al-`aqli*, hak untuk berpikir¹⁸
- d. *Hifdz al-mal*, hak milik individu/property right¹⁹
- e. *Hifdz al-`irdh*, hak mempertahankan nama baik²⁰

paling tidak sampai taraf tertentu, nilai-nilai tertentu seperti kebebasan, kesetaraan, rasa tanggung jawab, meskipun analisa yang mendalam tentang posisi-posisi kelompok islam dalam hal hak asasi manusia, kaum perempuan, orang-orang non-muslim, pemikir-pemikir bebas, orang-orang agnostik dan ateis akan mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip umum tersebut "tidak ada paksaan dalam beragama, kebebasan berpikir, kesetaraan dan lain-lain" dalam banyak hal terbatas dalam kerangka Islam. Lihat: Gudrun Kramer, *Teknik dan Nilai: Debat Muslim Kontemporer tentang Islam dan Demokrasi* dalam *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), 33. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha untuk membangun tatanan Islam yang sesuai dengan masa modern yang mampu mengakomodir hasil interaksi antara orang-orang Islam dan para pemikir islam, para pengkritik, masyarakat luas, dan Negara yang memiliki ide-ide yang berlainan agar tidak terjadi disintegrasi dalam masyarakat.

¹⁵ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 50.

¹⁶ QS. al-Maidah: 45; QS. al-Isra': 33.

¹⁷ QS. al-Baqarah: 256; QS. al-Kahfi: 29; QS. al-Kafirun: 1-6.

¹⁸ QS. al-Ahqaf: 19; QS. al-Baqarah: 164.

¹⁹ QS. al-Baqarah: 29; QS. an-Nisa': 29.

²⁰ QS. at-Taubah: 6.

- f. *Hifdz al-nasl*, hak untuk memiliki dan melindungi keturunan.²¹

Islam, Demokrasi dan Pendidikan

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam islam yang demokratis seperti *al-musawah* atau persamaan, *al-hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan, *al-ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia, *al-'adalah*, keadilan, *al-syura*, musyawarah, dan *al-mas'uliyah/responsibility*, tanggung jawab, maka dalam pendidikan islam dapat dilihat dari dua hal:

1. Epistemologi pendidikan Islam demokratis

Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan islam yang demokratis dalam *al-syura* ayat 38 yang dapat dipahami bahwa dalam islam, prinsip musyawarah dan persatuan umat merupakan salah satu sendi demokrasi yang perlu dikembangkan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Dasar pelaksanaan pendidikan islam juga dalam surat al-Shaffat (37) ayat 102-107:

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنُكُ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ
قَالَ يَتَابَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَابَرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّءْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ
نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْتُوَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحِ عَظِيمِ
﴿١٠٧﴾

Artinya: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya) dan Kami panggillah dia: "Hai

²¹ QS. al-Baqarah: 221; QS. ar-Rum: 21; QS. an-Nisa': 1; QS. at-Tahrim: 6.

Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan interaksi pendidikan Nabi Ibrahim a.s terhadap puteranya, Nabi Ismail a.s. Interaksi pendidikan terlihat pada peristiwa yang memerintahkan penyembelihan Ismail. Nabi Ibrahim telah meminimalisasi sikap otoritatif dalam pendidikan yaitu dengan memahami kesiapan mental anaknya dengan mengedepankan cara-cara dialogis. Demokratisasi seperti ini merupakan kearifan pendidik yang professional.

2. Paradigma pendidikan Islam demokratis

Dalam konsep islam, manusia diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna di antara semua makhluk. Manusia memiliki fitrah, yang dalam hal ini terdapat beberapa pengertian mengenai arti fitrah tersebut. Fitrah secara etimologis berarti bersih dan suci. Kata fitrah terdapat dalam surat ar-Rum ayat 30 bahwa fitrah itu adalah keyakinan tentang keesaan Allah, sementara pengertian yang lain adalah potensi dalam diri manusia.²² Sehingga kalau digabungkan antara kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fitrah adalah sifat dan kemampuan dasar manusia yang memiliki kecenderungan kepada kesucian dan kebaikan (naluri beragama tauhid) dan merupakan kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang dan perlu diarahkan. Untuk mengembangkan dan atau mengarahkan fitrah diper-

²² Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 53-58. Menurut Abd. Rachman Assegaf, fitrah berarti potensi yang dimiliki manusia untuk menerima agama, iman dan tauhid, serta perilaku suci yang dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pergaulan dan lingkungan yang kondusif. Lihat: Abd. Rahcman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 46. Fitrah pada manusia menurut Muhaimin ada 14 fitrah meliputi fitrah beragama, fitrah berakal budi, fitrah kebersihan dan kesucian, fitrah bermoral/berakhlak, fitrah kebenaran, fitrah kemerdekaan, fitrah persamaan dan persatuan, fitrah individu, fitrah sosial, fitrah seksual, fitrah politik, fitrah seni. Lihat: Muhaimin et. al., *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 18-19.

lukan suatu proses. Proses itu tidak lain adalah proses pendidikan dalam maknanya yang luas. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk membina, mengembangkan, memberdayakan dan mengarahkan potensi dasar insan agar sesuai dengan yang dikehendaki.²³ Begitu juga halnya dengan pendidikan islam.

Berkaitan dengan pengembangan potensi manusia, tentunya dengan pendidikan islam yang berparadigma demokratis setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁴

- a. Pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrahnya.
- b. Pendidikan yang menempatkan pendidik dan peserta didik sebagai subyek pendidikan yang saling berintegrasi, saling mengisi dan saling melengkapi satu dengan lainnya.
- c. Pendidikan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap keilmuan dan konsisten dengan prinsip belajar tuntas
- d. Pendidikan yang tidak hanya berhenti pada retorika dan teori, tetapi ada langkah-langkah konkret estafet dan pengalaman ilmu.

Selain itu pendidikan islam yang demokratis juga mengedepankan sisi humanisme dengan memperhatikan ada hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Perilaku manusia itu dipertimbangkan oleh *multiple intelligence*-nya. Bukan hanya kecerdasan intelektual semata, tetapi kecerdasan emosional dan spiritual.
- b. Anak didik adalah makhluk yang berkarakter, berkepribadian, aktif serta dinamis dalam perkembangannya sehingga pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian dan *self concept*.
- c. Dalam metode yang humanistik lebih menekankan aktualisasi diri
- d. Pembelajaran hendaknya berpusat pada siswa (*students centered learning*).

²³ Baharuddin, Moh. Makin, *Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Dunia Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 41.

²⁴ Syamsul Mu'arif dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2001), 138.

²⁵ Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis* (Malang: UMM Press, 2008), 122.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membicarakan hubungan Islam dan demokrasi terdapat beberapa perbedaan pandangan. Namun demikian dalam Islam, sesungguhnya ada nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi seperti *al-musawah* atau persamaan, *al-hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan, *al-ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia, *al-'adalah*, keadilan, *al-syura*, musyawarah, dan *al-mas'uliyah*, tanggung jawab.

Sejatinya, nilai-nilai demokrasi dalam Islam dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan, salah satunya dalam pendidikan. Pendidikan Islam demokratis merupakan suatu hal yang urgen dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam yaitu untuk mengembangkan potensi manusia sebagai *'abdullah* dan *khalifatullah fil-ard* yang handal, sukses di dunia dan di akhirat. ***

Daftar Pustaka

- Al-Fandi, Haryanto. *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Alim, Muhammad. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS, tt.
- Assegaf, Abd. Rahcman. *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Baharuddin. dkk. *Pendidikan Humanistik: Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Departemen Urusan Agama Islam, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Medinaal-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1971
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Ghofur, Abdul. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Klaff, Rene. *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.
- Kramer, Gudrun. *Teknik dan Nilai: Debat Muslim Kontemporer tentang Islam dan Demokrasi dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.
- Madaniy, A. Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- Mayo, Hendry B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960.
- Mu'arif, Syamsul. dkk. *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2001.
- Muhaimin. et.al. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ubaidillah, A. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.